

**Analisis PDRB, UMK, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap  
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat (2015-2021)**



**SKRIPSI**

Disusun dalam rangka menulis skripsi

Oleh :

Nama : Gegen Genial Chaidir Rahayu

Nomor Mahasiswa : 17313197

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**Analisis PDRB, UMK, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap  
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat (2015-2021)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna  
memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Gegen Genial Chaidir Rahayu

Nomor Mahasiswa : 173131197

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi apapun berdasarkan hukum/peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Maret 2023

Penulis,



Gegen Genial Chaidir Rahayu

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Analisis PDRB, UMK, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap  
Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat (2015-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Gegen Genial Chaidir Rahayu

Nomor Mahasiswa : 17313197

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 21 Febuari 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing,



Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis PDRB, UMK, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat (2015-2021)**

Disusun oleh : GEGEN GENIAL CHAIDIR RAHAYU

Nomor Mahasiswa 17313197

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Selasa, 04 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Achmad Tohirin, MA.,Ph.D

Penguji : Prastowo, SE.,M.Ec.Dev.



  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
  
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

## MOTTO

*“janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,  
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-  
orang yang beriman”*

(QS. Ali-Imran : 139)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu Bapak Narsa dan Ibu Nining Ratningsih yang telah mendukung penuh serta dengan doanya yang kuat agar penulis dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, tak lupa untuk kakak penulis Devie Nur Ghania yang juga memberikan dukungan baik secara moral maupun moril. Semoga dengan membuat skripsi ini dapat membahagiakan serta membuat bangga kedua orang tua serta kakak penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga, saudara, serta teman-teman yang selalu memanjatkan doa serta memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Tugas akhir atau Skripsi dengan judul “Analisis PDRB, IPM, UMK, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Jawa Barat” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak hanya karena usaha penulis sendiri, namun banyak pihak yang membimbing, membantu serta memberi semangat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Yth. Bapak Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Dosen-dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama bangku perkuliahan.
3. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis
4. Sahabat-sahabat serta teman-teman penulis, khususnya Kontrakan Rusun (Rumah Sunda) yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah di jurusan Ilmu Ekonomi.
5. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (FMIE) 2019/2020, Organisasi Daerah (IPMK), serta teman-teman kepanitiaan yang diikuti penulis yang telah memberikan pengalaman berharga serta cerita selama perkuliahan.
6. Berbagai pihak yang belum dapat penulis tuliskan, atas dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Semoga semua kebaikan, doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi yang dikerjakan masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka penulis menerima kritik dan saran. Penulis berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Yogyakarta, ... Maret 2023

Penulis,



Gegen Genial Chaidir Rahayu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN UJIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulis .....	6
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Kajian Pustaka .....	8
2.2. Landasan Teori .....	10
2.2.1. Tenaga Kerja .....	10
2.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja .....	11
2.2.3. Permintaan Tenaga Kerja .....	12
2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	13
2.2.5. Upah Minimum .....	14

2.2.6.	Investasi .....	15
2.2.7.	Pengeluaran Pemerintah ( <i>Government Expenditure</i> ) .....	16
2.3.	Hubungan Antar Variabel .....	16
2.3.1.	Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.3.2.	Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	17
2.3.3.	Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	18
2.3.4.	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	18
2.4.	Hipotesis Penelitian .....	19
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>		<b>20</b>
3.1.	Jenis dan Sumber Data.....	20
3.2.	Definisi Operasional .....	20
3.2.1.	Penyerapan Tenaga Kerja (Y).....	20
3.2.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ( $X_1$ ).....	20
3.2.3.	Upah Minimum Kabupaten/Kota ( $X_2$ ) .....	21
3.2.4.	Investasi ( $x_3$ ) .....	21
3.2.5.	Pengeluaran Pemerintah ( $X_4$ ).....	21
3.3.	Metode Analisis Data.....	22
3.4.	Pendekatan Model Regresi Data Panel .....	23
3.4.1.	<i>Common Effect Models (CEM)</i> .....	23
3.4.2.	<i>Fixed Effect Models (FEM)</i> .....	23
3.4.3.	<i>Random Effect Models (REM)</i> .....	23
3.5.	Model Estimasi Data Panel .....	23
3.5.1.	Uji Chow.....	24
3.5.2.	Uji Hausman .....	24
3.6.	Uji Hipotesis .....	24
3.6.1.	Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t statistik) .....	25
3.6.2.	Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (uji-F statistik) .....	25
3.6.3.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	25

<b>BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	26
4.1. Deskripsi Data .....	26
4.2. Hasil Regresi Data Panel.....	26
4.2.1. Uji Chow.....	26
4.2.2. Uji Hausman .....	27
4.2.3. Model Regresi Panel <i>Fixed Effect</i> .....	28
4.3. Uji Hipotesis.....	29
4.3.1. Uji-t (Uji Parsial).....	29
4.3.2. Uji-F .....	30
4.3.3. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	31
4.4. Pembahasan .....	31
4.4.1. Analisis Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	31
4.4.2. Analisis Variabel UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	32
4.4.3. Analisis Variabel Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	32
4.4.4. Analisis Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja .....	33
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b> .....	35
5.1. Kesimpulan.....	35
5.2. Implikasi.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	37
<b>LAMPIRAN</b> .....	40

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, dan Penduduk Bekerja (Jiwa).....	3
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif .....	26
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow .....	27
Tabel 4.3 Hasil Regresi Uji Hausman .....	28
Tabel 4.4 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Provinsi di Pulau Jawa .....	3
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa .....	4



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian .....	39
Lampiran 2 : Model Regresi Data Panel .....	44
Lampiran 3 : Estimasi Data .....	47



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2021. Metode yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil yang didapat dari pengujian menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja. Variabel PDRB, UMK, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

**Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, UMK, Investasi, Pengeluaran Pemerintah**





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting supaya terciptanya pembangunan ekonomi yang merata. Perluasan penyerapan tenaga kerja dibutuhkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Semakin tinggi angka pengangguran menjadi salah satu sumber utama meningkatnya jumlah kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi, namun lebih luas dari itu, yaitu juga dapat menghapuskan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menurunkan ketimpangan pendapatan (Todaro, 2006).

Diterimanya para pencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan sesuai bagian yang dibutuhkan ataupun suatu keadaan yang mencerminkan tersedianya lapangan pekerjaan yang telah terisi oleh para pencari kerja dikenal dengan istilah “penyerapan tenaga kerja”. Berdasarkan Ayat 2 pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau masyarakat sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja juga tidak lepas dari peranan pemerintah dalam merumuskan kebijakan guna menaikkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakannya. Untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang terserap ada beberapa faktor-faktor penting yang dapat memengaruhinya, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh unit produksi di suatu daerah dalam jangka periode tertentu. Dengan meningkatnya PDRB akan mengakibatkan peningkatan nilai

tambah total output atau penjualan di seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah, maka PDRB dapat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Menurut Feriyanto (2014), perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, sebagai respons dari peningkatan penjualan guna meningkatkan produksi dan penjualannya.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, karena pengeluaran pemerintah merupakan sumber penerimaan untuk masyarakat dan dapat merangsang permintaan secara keseluruhan. Produsen akan menaikkan produksinya akibat dari meningkatnya permintaan agregat, maka dari itu produsen membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sebagai tambahan nilai input produksi. Jadi ketika pengeluaran pemerintah meningkat, hal tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Upah minimum dapat memengaruhi tenaga kerja yang terserap, dikarenakan upah minimum berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan akan tenaga kerja di suatu wilayah. Perubahan tingkat upah akan memengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan dengan asumsi tingkat upah naik, maka biaya produksi pada perusahaan akan naik yang selanjutnya meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Sehingga tenaga kerja yang ditawarkan akan semakin kecil akibat dari upah yang semakin meningkat, dan akan berdampak kepada tenaga kerja yang terserap menjadi berkurang (Todaro, 2001).

Investasi dapat meningkatkan tenaga kerja yang terserap dan meningkatkan peluang kerja untuk masyarakat (Mellasari, 2020). Untuk mendirikan perusahaan baru ataupun memperbanyak usaha yang telah ada, maka diperlukannya modal. Sehingga penanaman modal (investasi) dapat meningkatkan produksi dan produktivitas di dalam perekonomian.

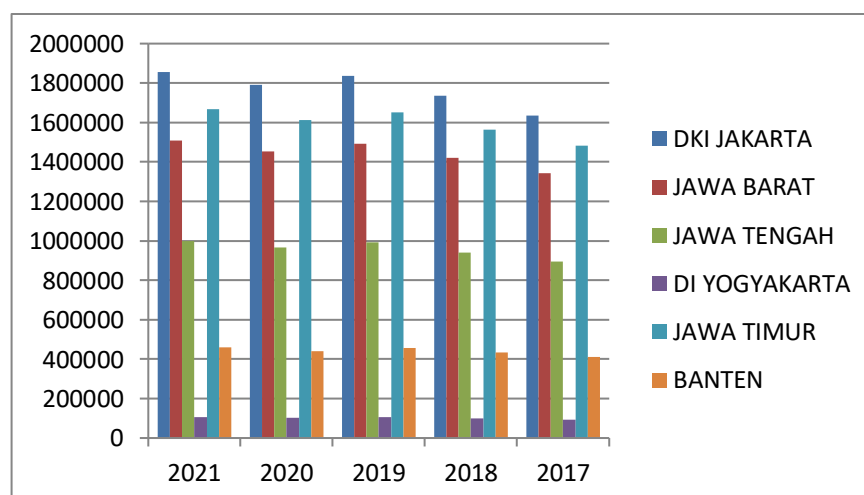
Meskipun Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam dan manusia, tetapi masih banyak angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk, yang tidak diiringi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Penduduk Bekerja di Jawa Barat (Jiwa)**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Bekerja (Jiwa)
2015	46.709.569	18.791.482
2016	47.379.389	19.202.038
2017	48.037.827	20.551.575
2018	48.683.861	20.779.888
2019	49.316.712	22.063.833
2020	49.935.858	21.674.854

Sumber : BPS

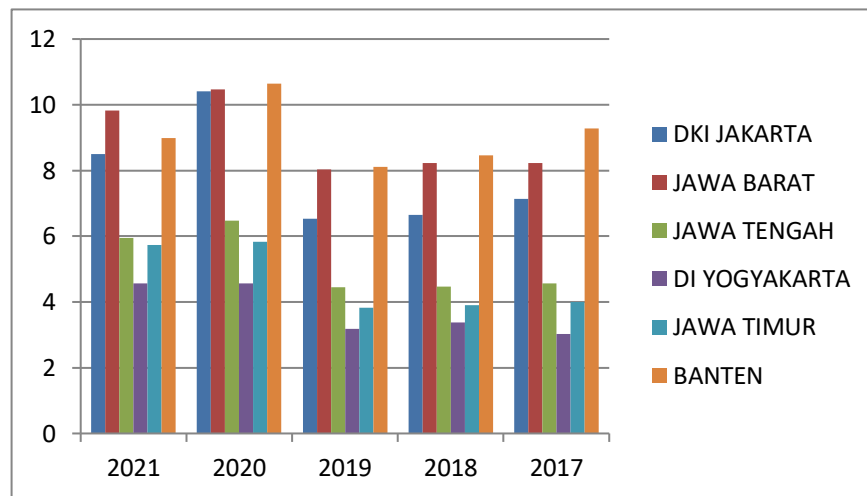
Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan. Di mana jumlah penduduk pada pada tahun 2020 mencapai 49.9 juta jiwa. Kemudian untuk penduduk bekerja juga mengalami kenaikan setiap tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 terdapat 22 juta jiwa penduduk bekerja, dan tahun 2020 hanya sebesar 21.6 juta jiwa. Setiap tahun penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, namun penyerapan tenaga kerjanya masih bersifat fluktuatif. Sehingga terlihat di Provinsi Jawa Barat kenaikan penduduk tidak diiringi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang terserap.



**Gambar 1.1 PDRB Provinsi di Pulau Jawa (Juta Rupiah)**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dari 5 tahun terakhir PDRB Provinsi Jawa Barat selalu menempati posisi ketiga secara Nasional. Kemudian dapat dilihat dari Gambar 1.1 dari tahun 2017 sampai tahun 2021 posisi teratas PDRB ADHK yaitu DKI Jakarta di mana pada tahun 2021 mencapai 1.8 Triliun, Jawa Timur mencapai 1.6 Triliun, dan Jawa Barat mencapai 1.5 Triliun.



**Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa (Persen)**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir berada di posisi kedua teratas secara Nasional. Dengan posisi teratas yang berganti antara Kepulauan Riau dan Provinsi Banten. Dari Gambar 1.2 diketahui TPT tahun 2021 Provinsi Jawa Barat mencapai 9.82%, disusul dengan Provinsi Banten mencapai 8.98 %. Hal tersebut bertolak belakang dengan asumsi di mana PDRB naik maka jumlah tenaga kerja akan naik atau terserap, yang kemudian tingkat pengangguran akan turun.

Berdasarkan data-data diatas jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat terus meningkat, dengan adanya peningkatan jumlah penduduk harapan untuk kedepannya pemerintah jawa barat bisa meningkatkan kualitas penduduknya agar mampu menghasilkan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Barat. Selain peningkatan penduduk juga harus diimbangi dengan penambahan jumlah lahan pekerjaan agar tidak mengakibatkan lahan pengangguran yang terus meningkat.

Dari hasil penjelasan di atas, maka penulis ingin mendalami apa saja yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat meliputi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah. Sehingga penulis ingin mengajukan judul penelitian yang akan diajukan yaitu: **“Analisis PDRB, UMK, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat (2015-2021)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh Investasi pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk menganalisis pengaruh UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini, dapat memperluas pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini, dimaksudkan dapat menjadi acuan atau referensi tambahan bagi mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian serupa.

3. Bagi Lembaga Terkait

Bagi lembaga pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat menentukan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja.

#### **1.5. Sistematika Penulis**

Pada penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Adapun dalam Bab 1 tentang pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dalam Bab 2 terkait kajian pustaka dan landasan teori menjelaskan mengenai kajian pustaka, landasan teori, hubungan antar

variabel, dan hipotesis penelitian. Pada Bab 3 yakni metode penelitian menjelaskan mengenai tipe dari sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Hasil analisis serta pembahasan terdapat di Bab 4 yang menjelaskan mengenai deskripsi data, hasil penelitian serta penjelasannya. Terakhir di Bab 5 kesimpulan dan implikasinya yang merupakan kristalisasi yang telah dicapai dalam masing-masing Bab sebelumnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi dokumentasi dan bahasan dari penelitian-penelitian terdahulu, yang pernah dilakukan dan dijadikan landasan bagi penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

Dari tahun 2011 hingga 2015, analisis penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Hizbullah (2018). Analisis kuantitatif penelitian ini menggunakan data regresi panel. Penyerapan tenaga kerja merupakan variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan IPM, angkatan kerja, upah minimum, dan PDRB merupakan variabel bebas. Studi ini menemukan bahwa angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan berkorelasi negatif dengannya.

Penelitian Analisis Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Khintan (2018). Regresi data panel dan analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini yakni penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel bebas yaitu pertumbuhan penduduk, produk domestik bruto, upah minimum, kunjungan wisatawan, dan jumlah industri. Kajian ini menemukan bahwa penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara negatif oleh jumlah industri, sedangkan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan penduduk, upah minimum, PDRB, serta kunjungan wisatawan.

Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa menjadi bahan penelitian Widyapangesti dan Soelistyo (2022). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja, sedangkan variabel independennya adalah PDRB, Upah Minimum, Investasi PMDN, dan Investasi PMA. Studi ini menemukan bahwa Investasi PMA, Investasi PMDN, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, tidak



ada pengaruh yang signifikan atau positif terhadap penyerapan tenaga kerja dari Upah Minimum Provinsi.

Hafiz dan Haryatiningsih (2021) melihat bagaimana PDRB, UMK, dan IPM memengaruhi penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota di Jawa Barat antara tahun 2010 sampai 2020. Metode analisis regresi data panel digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, Penyerapan tenaga kerja merupakan variabel terikat, sedangkan PDRB, Upah Minimum, dan IPM merupakan variabel bebas. Studi tersebut menunjukkan bahwa PDRB, Upah Minimum, dan IPM berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Wihastuti dan Rahmatullah (2018) menganalisis hubungan antara penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa dan upah minimum provinsi. Model *fixed effect* dan pendekatan regresi data panel digunakan dalam penelitian ini. Penyerapan tenaga kerja yang bekerja sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, sedangkan Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel bebas. Studi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi secara signifikan oleh upah minimum dan penyerapan tenaga kerja secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Jawa.

Yulia Pangastuti, (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan Analisis kuantitatif regresi linear berganda dengan Metode *Random Effect*. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel dependen, serta PDRB, Upah Minimum, Pengangguran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independennya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan PDRB berhubungan negatif terhadap tenaga kerja yang diserap. Sedangkan, penyerapan tenaga kerja berhubungan yang positif dengan PAD, upah minimum, dan pengangguran.

Muslihatinningsih, dkk (2020) melakukan penelitian tentang Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi data panel. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat, serta PDRB, upah

minimum, dan jumlah penduduk sebagai variabel bebasnya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan jumlah penduduk, upah minimum, serta PDRB berhubungan positif yang signifikan.

Analisis pengaruh PDRB, upah minimum provinsi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jambi, menjadi bahan penelitian yang digunakan oleh Ziyadaturrofiqoh (2018). Adapun variabel yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen, dan variabel independennya yakni PDRB, UMP, dan pengeluaran pemerintah di provinsi jambi dalam kurun waktu 1997 sampai 2015. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan, sedangkan UMP serta pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan keterlibatan tenaga dalam memproduksi barang dan jasa ataupun penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Ketentuan batas usia kerja di setiap negara berbeda-beda, di negara Indonesia ketentuan batas usia kerja penduduk yaitu umur 15 tahun sampai 64 tahun. Berdasarkan ayat 2 pasal pertama UU No.13 Tahun 2003 mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang sudah dapat memproduksi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri atau masyarakat sekitarnya. Sumarno (2003) mengatakan bahwa penduduk yang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja, atau yang sedang melakukan pekerjaan lain, seperti mengurus rumah atau sekolah, merupakan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah berusia 15 tahun keatas yang sedang mencari pekerjaan ataupun kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja seperti petani yang menunggu panen, atau pegawai yang sedang cuti. Kemudian yang bukan termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas namun kegiatan utama selama seminggu mengurus rumah tangga, menempuh pendidikan, dan lainnya. Indonesia memiliki

sumber daya manusia dan alam yang berlimpah. Maka dari itu SDM yang merupakan tenaga kerja perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Badan Pusat Statistik mengategorikan tenaga kerja menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. Tenaga kerja penuh yaitu tenaga kerja yang telah bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu, dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan tugas yang dilakukan.
2. Setengah pengangguran atau tenaga kerja tidak penuh yaitu tenaga kerja yang dalam seminggu jam kerjanya kurang dari 35 jam.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja yaitu tenaga kerja dengan jam kerja 0 kurang dari 1 jam dalam seminggunya.

### **2.2.2. Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Todaro (2001), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) sebagaimana mestinya. Secara umum, penyerapan tenaga kerja menunjukkan seberapa besar tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan supaya memproduksi suatu produk.

Tenaga kerja diserap dan didistribusikan di berbagai unit dan biasanya memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang relatif besar. Namun demikian, masing-masing sektor menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda, serta kemampuan masing-masing sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menyebabkan dua hal, yaitu :

1. Baik penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap pendapatan nasional akan mengalami pergeseran sektoral secara bertahap.
2. Laju peningkatan produktivitas kerja setiap bagian sektor berbeda-beda.

Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Banyaknya jumlah penduduk yang sudah bekerja, mencerminkan seberapa banyak lapangan pekerjaan yang sudah terisi atau terserap. Penduduk yang bekerja akan diserap dan didistribusikan ke berbagai

sektor perekonomian. Terserapnya penduduk untuk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono (1998) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila output yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja). Karena sesuai teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan input merupakan derived demand dari permintaan output, yang artinya permintaan akan input baru terjadi bila ada permintaan akan output. Akan tetapi jika perusahaan menggunakan padat modal maka permintaan tenaga kerja menurun, karena perusahaan atau industri telah menggunakan teknologi untuk memproduksi hasil outputnya.

### **2.2.3. Permintaan Tenaga Kerja**

Jumlah pekerja pada berbagai tingkat upah yang akan dipekerjakan oleh industri tertentu dijelaskan oleh teori permintaan tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat menyerap semua tenaga kerja, jika lapangan pekerjaan atau unit usaha yang tersedia memenuhi. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja seringkali bertolak belakang dengan permintaan konsumen akan jasa ataupun barang. Jika barang itu memberikan kepuasan kepada konsumen, maka konsumen akan membeli barang tersebut. Sedangkan perusahaan atau produsen akan mempekerjakan seseorang untuk membantu memproduksi barang dan jasa supaya dapat dijual ke konsumen. Sehingga pertambahan permintaan tenaga kerja, tergantung dari bertambahnya permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang diproduksi.

Baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat digunakan untuk menggambarkan permintaan akan tenaga kerja. Proses produksi perusahaan menggunakan modal tetap, sedangkan faktor input lainnya seperti tenaga kerja

bersifat variabel, sesuai dengan permintaan akan tenaga kerja jangka pendek. Permintaan tenaga kerja jangka panjang menggantikan penggunaan alat produksi yang relatif lebih murah. Hal ini disebabkan fleksibilitas perusahaan yang besar untuk dapat bereaksi lebih baik terhadap perubahan biaya alat produksi. Kenaikan upah memiliki dampak yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek (Feriyanto, 2014).

Jumlah orang yang dipekerjakan dipengaruhi oleh tingkat permintaan produk atau jasa. Tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diinginkan untuk dipekerjakan berhubungan dengan permintaan tenaga kerja. Aktivitas ekonomi dan tingkat upah memengaruhi permintaan. Apakah orang itu sedang bekerja, mencari pekerjaan, ataupun menawarkan jasa mereka adalah bagian dari proses penempatan atau hubungan di pasar tenaga kerja. Faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan berpengaruh pada berapa banyak orang yang bekerja. Dengan asumsi penawaran tenaga kerja akan meningkat jika tingkat upah meningkat, maka tingkat upah menentukan besarnya penawaran dan permintaan tenaga kerja.

#### **2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan PDRB sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu, atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga (nominal) dibuat berdasarkan harga yang berlaku dalam periode perhitungan dan digunakan untuk memeriksa struktur ekonomi. Sebaliknya, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga tahun dasar atau konstan (rill).

Salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan keadaan perekonomian setiap tahunnya yaitu data pendapatan nasional. Manfaat dari data tersebut adalah :

1. PDRB atas harga berlaku (nominal) menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan kapasitas sumber daya keuangan yang besar, dan sebaliknya

nilai PDRB yang rendah menunjukkan kapasitas sumber daya keuangan yang kecil.

2. Untuk menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun menggunakan PDRB atas harga konstan (riil).
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha merupakan struktur perekonomian atau peran masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah. Kategori-kategori ekonomi yang memegang peranan penting menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah.
4. PDRB per kapita harga berlaku merupakan nilai produk domestik bruto dan produk bruto nasional setiap penduduknya.
5. PDRB per kapita harga konstan digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi riil penduduk per kapita di suatu negara.

#### **2.2.5. Upah Minimum**

Upah merupakan hasil balas jasa yang dibayarkan oleh suatu produsen atau pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasanya, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditentukan oleh kontrak dan peraturan perundang-undangan yang disepakati para pihak, termasuk tunjangan untuk karyawan, dan keluarganya. Dengan adanya upah sebagai imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Sumarno, 2003).

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/karyawan yang diterima dari pemberi kerja atau perusahaan dan dinyatakan sebagai uang yang ditentukan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan dan layanan yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 terkait dengan upah minimum, yaitu upah bulanan yang terdiri dari

tunjangan tetap. Tarif tetap harian adalah premi bulanan yang tidak didasarkan pada jumlah absen atau tunjangan. Upah minimum dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Upah Minimum Sektoral

Bayaran yang berlaku di suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektornya disebut upah minimum sektoral.

2. Upah Minimum Regional

Untuk peraturan daerah tertentu, upah minimum regional adalah upah tetap dengan tunjangan kepada pekerja tingkat terendah dan didasarkan pada masa kerja kurang dari setahun.

#### **2.2.6. Investasi**

Menurut Badan Pusat Statistik, investasi adalah kegiatan menanam modal dalam berbagai kegiatan ekonomi (produksi), yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi pada dasarnya terbagi menjadi investasi keuangan (finansial) dan investasi bukan keuangan (non finansial). Investasi keuangan mengacu pada investasi yang datang dalam bentuk kepemilikan instrumen keuangan seperti uang tunai, deposito, tabungan, saham dan sejenisnya. Investasi non finansial dilakukan sebagai investasi fisik (investasi riil) berupa barang modal, termasuk gudang (inventori) yang terkandung di dalamnya. Investasi finansial juga dapat direalisasikan sebagai aset riil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal (investasi) adalah bermacam bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), yang digunakan untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia. Secara umum, investasi dibagi menjadi investasi dalam negeri dan asing. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah pemanfaatan kekayaan Indonesia, yang meliputi hak milik yang dimiliki oleh pemerintah, warga negara/asing yang menetap di Indonesia. PMDN diperlukan



untuk kelangsungan usaha pada setiap sektor yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi.

Suyatno (2003), mendefinisikan penanaman modal asing (PMA) sebagai transfer modal dari luar negara ke sektor swasta melalui investasi langsung atau tidak langsung (sekuritas). Investasi portofolio dan investasi asing langsung termasuk dua jenis PMA. Investasi portofolio, biasanya dilakukan melalui lembaga keuangan sebagai perantaranya. Investasi nyata seperti perolehan barang modal atau pembangunan pabrik, dikenal sebagai investasi asing langsung.

### **2.2.7. Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)**

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menetapkan besaran pendapatan dan belanja pemerintah setiap tahunnya, yang dipublikasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan komponen dari kebijakan fiskal.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya masing-masing dalam rangka pembangunan daerahnya. Sektor pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan menerima sebagian besar pendanaan dari pemerintah daerah. Akibatnya, semakin banyak pekerja yang terdidik dan produktivitas perekonomian akan meningkat. Anggaran pemerintah daerah juga digunakan untuk mendanai berbagai layanan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk taman, perawatan kesehatan, pemadam kebakaran, sanitasi, pengawasan umum, dan sebagainya.

## **2.3. Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1. Hubungan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Mankiw (2014), terdapat hukum Okun (Okun's Law) yang merepresentasikan hubungan yang bertolak belakang antara pengangguran dan PDRB. Hukum Okun mengingatkan kita bahwa faktor yang mendorong siklus



usaha dalam jangka pendek tidak sama dengan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan produk domestik bruto berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan sebaliknya.

Dengan meningkatnya PDRB akan mengakibatkan peningkatan nilai tambah total output atau penjualan di seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah, maka PDRB dapat berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Menurut Feriyanto (2014), perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, sebagai respons dari peningkatan penjualan guna meningkatkan produksi dan penjualannya.

### **2.3.2. Hubungan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Upah akan disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dalam keseimbangan pasar tenaga kerja. Ketika upah minimum dinaikkan, upah dan jumlah pekerja akan mencapai ekuilibrium. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja lebih besar dari penawarannya ketika upah minimum lebih tinggi dari upah sebelumnya (Mankiw, 2012).

Menurut Sumarno (2003), perubahan tingkat upah memengaruhi biaya produksi perusahaan. Jika diasumsikan bahwa tingkat upah akan meningkat, hal berikut terjadi :

1. Kenaikan tingkat upah meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan harga satuan barang yang diproduksi. Konsumen biasanya bereaksi cepat terhadap kenaikan harga barang, misalnya dengan mengurangi konsumsi atau tidak membeli lagi barang tersebut. Akibatnya, banyak barang yang tidak terjual dan produsen harus mengurangi produksinya. Untuk meringankan biaya akibat penurunan volume produksi, perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga menambah angka pengangguran dan mengurangi tenaga kerja yang terserap.

2. Ketika upah naik (dengan asumsi harga barang lain tidak berubah), perusahaan lebih memilih menggunakan teknologi padat modal dalam proses produksi dan menggantikan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan barang modal seperti mesin dan lain-lain. Akibatnya, perubahan atau peningkatan penggunaan mesin-mesin tersebut akan mengurangi angka tenaga kerja yang dibutuhkan, yang tentunya akan berdampak pada tenaga kerja yang akan terserap.

### **2.3.3. Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Widyapangesti dan Soelistyo (2022), investasi atau penanaman modal merupakan pendorong utama dalam penyerapan tenaga kerja, modal dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Penyerapan tenaga kerja yang besar dikarenakan adanya perluasan lapangan pekerjaan, sehingga investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Adanya investasi dalam masyarakat dapat memberikan dan meningkatkan kesempatan kerja, yang juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksinya dengan memperluas usahanya dan menambah tenaga kerja. Bertambahnya modal dalam setiap aktivitas pembangunan akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penyediaan lapangan kerja secara total. Peningkatan investasi tentu akan diikuti dengan penambahan tenaga kerja. Sehingga setiap penambahan investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

### **2.3.4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya perekonomian yang terdokumentasikan dalam APBD. Menurut Sukirno (2007), tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output dan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan

lapangan kerja. Karena pengeluaran pemerintah merupakan sumber pendapatan masyarakat untuk merangsang permintaan agregat, maka dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh sektor bisnis. Produsen membutuhkan input produksi tambahan tenaga kerja termasuk salah satunya, dikarenakan permintaan agregat mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, lapangan kerja dapat meningkat dan menyerap tenaga kerja lebih banyak sebagai akibat dari peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mempunyai *multiplier effect* terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari output dan ketenagakerjaan. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Sukirno, 2007)

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang sudah ada maka dapat disimpulkan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel PDRB diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
2. Variabel UMK diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
3. Variabel investasi diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
4. Variabel pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Di mana data yang peneliti tidak berusaha kumpulkan sendiri disebut sebagai data sekunder. Lembaga-lembaga pengumpulan data biasanya menerbitkan data sekunder ke masyarakat pengguna data. Sebaliknya, data yang dimanfaatkan dan diolah oleh suatu organisasi atau individu langsung dari objeknya disebut sebagai data primer. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, Badan Pusat Statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Kajian ini adalah analisis data sekunder mengenai pengaruh PDRB, upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Data panel yang digunakan mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel bebasnya adalah produk domestik regional bruto, upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah.

#### **3.2. Definisi Operasional**

##### **3.2.1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)**

Penyerapan tenaga kerja yaitu jumlah pekerjaan yang diduduki, yang tercermin dari jumlah orang yang bekerja. Penyerapan pekerjaan tercermin dari jumlah orang yang bekerja disini. Metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis data panel. Badan Pusat Statistik Jawa Barat menyediakan data jumlah orang yang bekerja dalam satuan jiwa.

##### **3.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ( $X_1$ )**

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu, atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah disebut PDRB. Dalam penelitian ini, analisis data panel dan data sekunder digunakan dalam metode

tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data PDRB atas dasar harga konstan dalam jutaan rupiah.

### **3.2.3. Upah Minimum Kabupaten/Kota ( $X_2$ )**

Upah adalah kompensasi aktual yang diterima pekerja untuk kerja mereka. Salah satu faktor yang memengaruhi tenaga kerja adalah upah. Hal tersebut karena upah berdampak pada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, analisis data panel dan data sekunder digunakan dalam metode tersebut. Data upah minimum kabupaten/kota yang digunakan pada kajian ini diambil dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Data dinyatakan dalam satuan rupiah.

### **3.2.4. Investasi ( $x_3$ )**

Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Variabel investasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa total jumlah realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data investasi PMDN dan PMA diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu dalam satuan rupiah.

### **3.2.5. Pengeluaran Pemerintah ( $X_4$ )**

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang dipublikasikan dalam dokumen APBN ataupun APBD. Data pengeluaran pemerintah pada penelitian ini diambil dari jumlah total realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa barat, dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

### 3.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel dan analisis kuantitatif. Data *cross-section* dan *time series* digabungkan dalam data panel, atau data kumpulan. Data *cross-section* adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu untuk sejumlah besar orang, sedangkan data *time series* dikumpulkan secara berkala untuk satu individu.

Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, untuk mengetahui apakah variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen. Bentuk umum regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 UMK + \beta_3 Investasi + \beta_4 Pengeluaran Pemerintah + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y	: Jumlah Orang Bekerja (jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)
Investasi	: Total Realisasi Investasi (juta rupiah)
Pengeluaran Pemerintah	: Total Pengeluaran Pemerintah (juta rupiah)
$B_0$	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	: Koefisien Regresi Berganda
$\varepsilon_{it}$	: Variabel Pengganggu

Widarjono (2017) menjelaskan banyak manfaat penggunaan data panel untuk suatu penelitian. Pertama, data panel yang merupakan gabungan data *cross-section* dan data *time series*, dapat memberikan lebih banyak data dan menghasilkan *degree of freedom*. Kedua, dalam hal menghilangkan variabel, masalah dapat diselesaikan dengan menggabungkan data dari *cross-section* dan *time series*.

### **3.4. Pendekatan Model Regresi Data Panel**

Ada tiga pendekatan regresi dalam model data panel yang dapat digunakan untuk menentukan hasil regresi terbaik untuk penelitian. Tiga metode untuk melakukan regresi data panel sebagai berikut:

#### **3.4.1. *Common Effect Models (CEM)***

Menurut Rosadi (2012), *Common Effect Models* merupakan analisis regresi yang mengasumsikan data dengan kurun waktu yang sama. Keseluruhan data ini dianggap mempunyai perilaku yang sama dalam berbagai kurun waktu. Kombinasi antara data *time series* dan *cross section* membentuk pool di mana estimasinya menerapkan *pooled least square*.

#### **3.4.2. *Fixed Effect Models (FEM)***

Menurut Gujarati (2012), model *fixed effect* adalah model dengan point yang tidak sama untuk setiap subjek (*cross section*). Namun setiap subjek tidak berbeda seiring berjalannya waktu. Perbedaan satu subjek dari yang lain menggunakan variabel dummy. Model ini juga biasa disebut sebagai model *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*.

#### **3.4.3. *Random Effect Models (REM)***

Menurut Kuncoro (2012), model *random effect* dihasilkan dari nilai variasi dan arah hubungan setiap subjek, yang diasumsikan acak dan didefinisikan dalam wujud residual. Model ini mengestimasi data panel di mana variabel residual diasumsikan sebagai hubungan antara subjek dan waktu. Metode analisis data panel menggunakan model *random effect* harus memenuhi satu syarat yaitu jumlah *cross-section* harus lebih besar dari jumlah variabel penelitian

### **3.5. Model Estimasi Data Panel**

Beberapa pengujian dilakukan untuk memilih model estimasi yang sesuai dari ketiga model yang tercantum di atas, antara lain:



### 3.5.1. Uji Chow

Untuk mengestimasi data panel, uji Chow digunakan untuk menetapkan model *common effect* atau *fixed effect* mana yang terbaik. Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Models}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Models}$$

Hipotesis  $H_0$  ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. sehingga model *fixed effect* digunakan pada regresi data panel ini. Sebaliknya  $H_1$  ditolak jika F tabel lebih besar dari nilai F hitung. sehingga model *common effect* digunakan pada regresi data panel ini.

### 3.5.2. Uji Hausman

Uji statistik yang disebut uji Hausman dipakai untuk memutuskan apakah model *fixed effect* atau model *random effect* harus digunakan. Uji Hausman menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Models}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Models}$$

Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan derajat sejumlah variabel terikatnya. Hipotesis akan menerima apabila nilai statistik Hausman lebih tinggi dari nilai *chi-square* ataupun p value lebih rendah dari nilai  $\alpha$  yang dipakai. Hal tersebut menjelaskan bahwa model *random effects* dipakai dalam regresi data panel ini. Sebaliknya apabila nilai  $\alpha$  lebih kecil dari p-value, maka model *fixed effect* lebih baik digunakan dalam regresi data panel.

### 3.6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji statistik yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien regresi parsial (uji t), uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dan koefisien determinasi (uji  $R^2$ ).



### 3.6.1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t statistik)

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji-t statistik. Tujuannya yaitu untuk meninjau parameter secara parsial atau individual pada tingkat reliabilitas tertentu. Hipotesis dari uji-t statistik sebagai berikut :

$H_0$  : Secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1$  : Secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian ini diasumsikan ketika probabilitas nilai t hitung lebih kecil daripada  $\alpha = 10\%$  (nilai  $t_{hitung} < 0.1$ ), maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sebaliknya ketika probabilitas t hitung lebih besar daripada  $\alpha = 10\%$  (nilai  $t_{hitung} > 0.1$ ), maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ .

### 3.6.2. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (uji-F statistik)

Proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersamaan atau bersama-sama diukur dengan menggunakan statistik uji-F. Hipotesis yang dilakukan dari pengujian uji-F ini yaitu :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Apabila F hitung lebih besar daripada tabel F (kritis) maka akan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Sebaliknya apabila F hitung lebih kecil daripada tabel F (kritis) maka menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$ .

### 3.6.3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Sriyana (2014), mengatakan bahwa koefisien determinasi dipakai untuk melihat seberapa baik merepresentasikan nilai  $R^2$  dalam analisis. Proporsi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model dan sisanya yang tidak dapat dijelaskan oleh model untuk menentukan besarnya  $R^2$ .

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis data panel yang merupakan data gabungan antara *cross section* dan *time series*. Data *cross section* diambil dari 27 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Barat, dan data *time series* yang digunakan yaitu orang yang bekerja (Y), PDRB ( $X_1$ ), UMK ( $X_2$ ), investasi ( $X_3$ ), dan pengeluaran pemerintah ( $X_4$ ) dalam kurun waktu 2015-2021. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Ketenagakerjaan. Berikut hasil uji deskriptif statistik dengan menggunakan *E-Views 10*.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif**

	Orang Bekerja (Jiwa)	PDRB (Juta)	UMK (Rupiah)	Investasi (Juta)	Pengeluaran Pemerintah (Juta)
Mean	771.675	50.377	2.517.439	4.346.198	3.388.174
Median	711.610	27.596	2.280.175	987.653	3.075.960
Maximum	2.539.196	251.828	4.798.312	54.057.620	8.984.354
Minimum	77.929	2.624	1.131.862	0	688.144
Std. Dev.	509.642	57.882	902.763	9.015.105	1.740.811
Jarque-Bera	51,61	178,28	14,82	1647,53	22,35
Probability	0,000000	0,000000	0,000602	0,000000	0,000014
Observations	189	189	189	189	189

Sumber : Hasil olah data, 2023

#### 4.2. Hasil Regresi Data Panel

##### 4.2.1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model terbaik antara model *common effect* dengan model *fixed effect*, dilihat dari perbandingan nilai probabilitas *Cross-F* dengan nilai  $\alpha$ . Hipotesis dari uji chow yang digunakan sebagai berikut :

$H_0$  : *Common Effect Model* lebih baik

$H_1$  : *Fixed Effect Model* lebih baik

Asumsinya apabila nilai probabilitas *Cross-F* lebih besar dari  $\alpha=10\%$ , maka hasilnya menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Artinya model terbaik untuk digunakan yaitu *Common Effect Model*. Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Cross-F* lebih kecil dari  $\alpha=10\%$ , maka hasilnya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Artinya model terbaik untuk digunakan yaitu *fixed effect model*.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	151.688445	(26,158)	0,0000
Cross-section Chi-square	615.499370	26	0,0000

Sumber : Hasil olah data, 2023

Dari Tabel 4.2 nilai probabilitas *Cross-F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$ , yang artinya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Sehingga dari uji chow tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

#### 4.2.2. Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian untuk menentukan model terbaik antara *Fixed effect model* dengan *Random effect model*, dilihat dari perbandingan nilai probabilitas *Cross* dengan nilai  $\alpha$ . Hipotesis dari uji hausman yang digunakan sebagai berikut :

$H_0$  : *Random Effect Model* lebih baik

$H_1$  : *Fixed Effect Model* lebih baik

Asumsinya apabila nilai probabilitas *Cross* lebih besar dari  $\alpha=10\%$ , maka hasilnya menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Artinya model terbaik untuk digunakan

yaitu *random effect model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Cross* lebih kecil daripada  $\alpha=10\%$ , maka hasilnya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Artinya model terbaik untuk digunakan yaitu *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	111.030909	4	0,0000

Sumber : Hasil olah data, 2023

Dari Tabel 4.3 nilai probabilitas *Cross* sebesar 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$ , yang artinya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Sehingga dari uji hausman tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *random effect model*.

#### 4.2.3. Model Regresi Panel *Fixed Effect*

Berdasarkan pengujian yang telah dijalankan yaitu, uji chow dan uji hausman model yang layak digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sehingga model yang dipakai pada penelitian ini menggunakan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil regresi data panel *Fixed Effect Model* menggunakan *E-views 10* :

**Tabel 4.4 Hasil Regresi *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	378326,5	25884,11	14,61617	0,0000
PDRB	3,112725	0,703096	4,427169	0,0000
UMK	0,056509	0,011270	5,014039	0,0000
Investasi	0,000360	0,001362	0,264300	0,7919
Pengeluaran Pemerintah	0,027364	0,008213	3,331616	0,0011
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,994871	Prob(F-statistic)		0,00000 0
Adjusted R-squared	0,993897	S.D. dependent var		509.642
F-statistic	1021,521	Durbin-Watson stat		1,12366 4

Sumber : Hasil olah data, 2023

Berikut model regresi model *fixed effect* pada penyerapan tenaga kerja :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 UMK + \beta_3 Investasi + \beta_4 Pengeluaran Pemerintah + \varepsilon_{it}$$

$$Y = 378326,5 + 3,112725PDRB + 0,056509UMK + 0,000360Investasi + 0,027364Pengeluaran Pemerintah + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y	: Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)
Investasi	: Total Realisasi Investasi (juta rupiah)
Pengeluaran Pemerintah	: Total Pengeluaran Pemerintah (juta rupiah)

### 4.3. Uji Hipotesis

#### 4.3.1. Uji-t (Uji Parsial)

Dengan asumsi bahwa semua variabel lain tetap konstan, uji-t adalah tes yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh variabel independen PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Uji-t dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas dan nilai  $\alpha=10\%$ .

#### 1. Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai koefisien PDRB sebesar 3,1127 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  ( $0,0000 > 0,1$ ), yang artinya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dapat diartikan apabila PDRB naik

sebesar 1 juta rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 3.112 jiwa.

## 2. Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai koefisien UMK sebesar 0,0565 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  ( $0,0000 < 0,1$ ), yang artinya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dapat diartikan apabila UMK naik sebesar 1 rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 56 jiwa.

## 3. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai koefisien Investasi sebesar 0,0003 dan nilai probabilitas sebesar 0,7867. Nilai probabilitas 0,7919 lebih besar dari  $\alpha=10\%$  ( $0,7867 > 0,1$ ), yang artinya menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

## 4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai koefisien Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,0273 dan nilai probabilitas sebesar 0,0012. Nilai probabilitas 0,0012 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  ( $0,0012 < 0,1$ ), yang artinya menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dapat diartikan apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 juta rupiah, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 27 jiwa.

### 4.3.2. Uji-F

Uji-F ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi model *Fixed Effect* pada tabel 4.4, nilai *F-Statistic* sebesar 1021,521 dan

nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas 0,000000 lebih kecil dari  $\alpha=10\%$  ( $0,000000 < 0,1$ ), yang artinya menerima H1 dan Menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

#### **4.3.3. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil regresi model *Fixed Effect* pada Tabel 4.4, diketahui nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,993897. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sebesar 99%. Sementara, sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **4.4.1. Analisis Variabel PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 4.4 variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai koefisien 3,112725 dan probabilitas sebesar 0,0000. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yakni PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khitan (2018), dan Muslihatinningsih (2020). Di mana pada penelitian tersebut PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam hukum okun (*Okun's law*) mengingatkan kita bahwa faktor yang mendorong siklus usaha dalam jangka pendek tidak sama dengan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan produk domestik bruto berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan sebaliknya. Dengan meningkatnya PDRB akan mengakibatkan peningkatan nilai tambah total output atau penjualan di seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah, maka PDRB dapat berpengaruh terhadap angka tenaga kerja. Menurut Feriyanto (2014), perusahaan akan terdorong untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, sebagai respons dari peningkatan penjualan guna meningkatkan



produksi dan penjualannya. Sehingga PDRB dapat meningkatkan tenaga kerja yang terserap.

#### **4.4.2. Analisis Variabel UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil olah data *fixed effect model* yang terdapat Tabel 4.4 variabel UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan nilai koefisien sebesar 0,056509 dan nilai probabilitas 0,0000. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis di mana UMK memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro (2001), apabila upah semakin tinggi maka tenaga kerja yang ditawarkan akan semakin sedikit sehingga penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Meski penelitian ini tidak sejalan dengan teori, namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiz (2021) dan Hizbullah (2018). Di mana penelitian tersebut mengatakan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dengan adanya kejadian tersebut di mana meningkatnya upah dapat meningkatkan tenaga kerja, hal itu sesuai dalam teori upah efisiensi (*Efficiency-Wage*). Dalam teori tersebut upah yang dibayarkan terlalu besar akan menguntungkan perusahaan, dikarenakan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas tenaga kerja. Teori ini lebih berdampak terhadap negara-negara yang sedang berkembang karena upah itu memengaruhi nutrisi (Mankiw, 2012). Selain itu dengan meningkatnya upah minimum dapat memengaruhi daya beli masyarakat, yang dapat meningkatkan permintaan serta diikuti oleh banyaknya pengusaha yang masuk pasar. Sehingga pengusaha akan mengupayakan untuk dapat meningkatkan atau menambah jumlah unit, dengan begitu diharapkan pengusaha akan meningkatkan tenaga kerjanya.

#### **4.4.3. Analisis Variabel Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 4.4 variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, naik turunnya investasi tidak berdampak terhadap naik turunnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tidak sesuai hipotesis yakni investasi berpengaruh positif dan



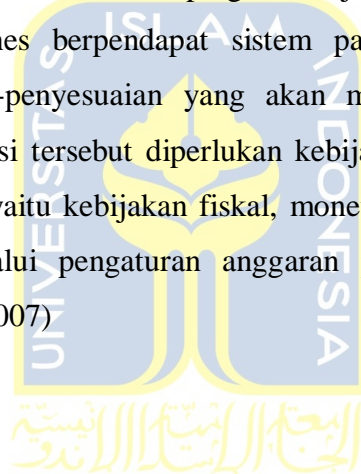
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Meski tidak sesuai dengan teori, namun penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wasilaputri (2016), dan Liana (2020). Di mana pada penelitian tersebut investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dilihat dari fenomena tersebut, investasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terjadi dikarenakan investor lebih memilih menanamkan modalnya di industri padat modal dibandingkan padat karya. Di mana untuk meningkatkan produksinya perusahaan lebih membutuhkan alat-alat seperti mesin daripada tenaga kerjanya, sehingga investasi yang tinggi tidak memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Investasi yang cenderung padat modal dapat mengakibatkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tercipta. Dalam teori pertumbuhan, peningkatan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor. Yaitu kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (pertumbuhan penduduk dan pendidikan), penanaman modal (investasi), dan penyempurnaan teknologi. Kemudian analisis Solow membentuk formula matematik dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris yang menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan penanaman modal dan penambahan tenaga kerja, faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan kemahiran tenaga kerjanya (Sukirno, 2007).

#### **4.4.4. Analisis Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil olah data *fixed effect model* yang terdapat di Tabel 4.4 variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, dengan nilai koefisien 0,027364 dan probabilitas sebesar 0,0011. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yakni pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2020), dan Pratiwi (2019). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Menurut Sukirno (2007), tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output dan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Karena pengeluaran pemerintah merupakan sumber pendapatan masyarakat untuk merangsang permintaan agregat, maka dapat meningkatkan output yang dihasilkan oleh sektor bisnis. Produsen membutuhkan input produksi tambahan tenaga kerja termasuk salah satunya, dikarenakan permintaan agregat mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, lapangan kerja dapat meningkat dan menyerap tenaga kerja lebih banyak sebagai akibat dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Selain itu pengeluaran pemerintah mempunyai *multiplier effect* terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari output dan ketenagakerjaan. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan *full employment*. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Tiga bentuk kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal, moneter dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Sukirno, 2007)



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian atas PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen, dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2021. Dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti :

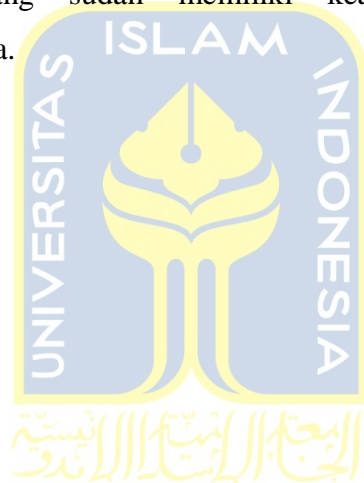
1. Semua variabel independen yaitu PDRB, UMK, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara serentak atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
4. Variabel investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
5. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

#### **5.2. Implikasi**

1. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat, di antaranya PDRB memiliki pengaruh besar dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal tersebut pemerintah dapat meningkatkan PRBD dengan cara memberikan bantuan modal ataupun mempermudah pendirian usaha kepada para pelaku usaha

guna dapat meningkatkan output produknya. Sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

2. Penentuan jumlah upah minimum kabupaten/kota juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut sangat baik mengingat UMK memiliki peran yang positif terhadap tenaga kerja yang diserap. Namun pemerintah tetap perlu mengawasi kebijakan terkait upah supaya UMK tidak berbalik menjadi negatif.
3. Untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat dengan cara meningkatkan keahlian masyarakatnya. Pemerintah dapat meningkatkan keahlian masyarakat melalui pendidikan ataupun pelatihan. Dengan begitu masyarakat yang sudah memiliki keahlian dapat meningkatkan produktivitasnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016-2022). Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2016-2022. Diambil Agustus 2022 dari <https://jabar.bps.go.id/>.
- Boediono. (1998). Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE : Yogyakarta
- Dedi Rosadi. (2012). Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan *Eviews*. Yogyakarta : Andi Offset
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2022). Surat Keputusan Gubernur. Diambil Agustus 2022 dari <http://disnakertrans.jabarprov.go.id/>
- Feriyanto, Nur. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Gujarati, N, Damodar. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan). Buku2. Edisi 5. Penerbit Salemba: Jakarta.
- Hafiz, E. A., & Haryatiningsih, R. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Journal Riset Ilmu Ekonomi Vol. 1 No.1*, 55-65.
- Hakim, A. (2012). Ekonomi Pembangunan, Ekononisia, Yogyakarta.
- Hizbullah, I. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2011-2015. Skripsi Sarjana (DSpace UII) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Khintan, N. S,. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Skripsi Sarjana (DSpace UII) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 1*, hal. 45-56.
- Lina Liana, I. F. (2020). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas*, Hal 657-661.
- Makhroji, D. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Ekonomi Pembangunan*, 52-72.
- Mankiw. (2012). “ Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Asia Volume 2”. Salemba Empat, Jakarta.
- Mankiw. (2014). “ Pengantar Ekonomi Mikro. Edisi Asia Volume 1”. Salemba Empat, Jakarta

- Mellasari Desy, (2020). Pengaruh UMP, PDRB, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Di Pulau Jawa. *JII : Jurnal Investasi Islam Vol. 5 No2*, 111-120
- Muslihatinningsih, F., Walid, M., & Subagiarta, I. W. (2020). Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. VII*, 1-6.
- Ni Putu Ambar Pratiwi, I. G. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi. Vol. 24 No. 2*, Hal 220-233.
- Pangastuti, Y. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal 4*, 203-211.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum
- Silaen, M. L., & Esther, A. M. (2015). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri Di Provinsi Jawa Barat. *Media Ekonomi Vol.3 No. 3*, 189-198.
- Siti Aisyah1, I. N. (2020). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta. *University Research Colloquium*, Hal 1-4.
- Sriyana, J. (2014). Metode Regresi Data Panel, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. (2007) Makroekonomi Modern, Edisi 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarno, Sonny. (2003). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suyatno, T. (2003). *Dasar-Dasar Perkreditan* (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M. & S.C. Stephen. (2001). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Wasilaputri, F. R. (2016). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, No 3*, Hal 243-250.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonisia, Yogyakarta.

Widyapangesti, D. I., & Soelistyo, A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6 No.1*, 123-133.

Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Gama Societa Vol. 1 No. 1*, 96-102.

Ziyadaturrofiqoh, Z. M. (2018). Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 7. No.1*, Hal 13-22.





## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Orang Bekerja (Jiwa)	PDRB (Juta Rupiah)	UMK (Rupiah)	Investasi (Juta Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)
Bandung	2015	1.438.365	64.701	2.001.195	941.232	4.417.905
Bandung	2016	1.511.378	68.804	2.275.715	861.518	5.133.749
Bandung	2017	1.584.391	73.039	2.463.461	3.157.513	4.751.086
Bandung	2018	1.575.661	77.613	2.678.029	3.134.972	5.908.760
Bandung	2019	1.678.121	82.547	2.893.075	5.259.534	5.782.093
Bandung	2020	1.569.974	81.059	3.139.275	3.946.607	5.011.245
Bandung	2021	1.673.019	83.947	3.241.930	2.392.936	5.547.089
Bandung Barat	2015	563.252	25.486	2.004.637	467.767	2.153.230
Bandung Barat	2016	617.549	26.925	2.280.175	971.614	2.509.232
Bandung Barat	2017	671.847	28.330	2.468.289	1.025.244	2.889.922
Bandung Barat	2018	683.877	29.888	2.683.277	813.613	2.926.114
Bandung Barat	2019	701.917	31.398	2.898.745	4.124.276	3.174.903
Bandung Barat	2020	656.087	30.640	3.145.428	3.117.524	3.510.540
Bandung Barat	2021	676.733	31.701	3.248.283	2.818.444	5.219.958
Bekasi	2015	1.344.821	205.950	2.840.000	33.130.528	4.356.924
Bekasi	2016	1.372.282	215.928	3.261.375	48.800.155	5.654.601
Bekasi	2017	1.399.743	228.203	3.530.438	32.626.277	5.748.048
Bekasi	2018	1.472.432	241.949	3.837.940	54.057.620	6.329.205
Bekasi	2019	1.612.313	251.502	4.146.126	47.359.388	6.701.777
Bekasi	2020	1.628.231	242.959	4.498.962	37.323.875	6.460.161
Bekasi	2021	1.756.261	251.828	4.791.844	43.263.318	7.128.761
Bogor	2015	2.083.234	124.486	2.590.000	8.707.528	6.288.745
Bogor	2016	2.217.493	131.760	2.960.325	7.828.480	7.330.903
Bogor	2017	2.351.753	139.561	3.204.552	6.395.725	7.671.640
Bogor	2018	2.356.875	148.203	3.483.667	8.687.961	8.222.328
Bogor	2019	2.539.196	156.876	3.763.406	9.180.854	8.984.354
Bogor	2020	2.342.939	154.113	4.083.670	9.160.396	7.823.871
Bogor	2021	2.445.768	159.582	4.217.206	9.896.928	7.689.680
Ciamis	2015	494.078	17.779	1.131.862	0	2.159.364
Ciamis	2016	548.100	18.844	1.363.319	0	2.488.438
Ciamis	2017	602.123	19.826	1.475.793	53.214	2.544.356
Ciamis	2018	583.910	20.878	1.604.334	249	2.645.920
Ciamis	2019	601.243	22.001	1.733.162	0	2.965.254



Ciamis	2020	640.767	21.970	1.880.655	313	2.507.073
Ciamis	2021	637.102	22.774	1.880.655	3.186	2.408.020
Cianjur	2015	863.592	25.352	1.600.000	712.698	2.832.311
Cianjur	2016	854.925	26.981	1.837.520	1.587.644	3.489.692
Cianjur	2017	846.258	28.538	1.989.115	681.259	3.864.468
Cianjur	2018	881.180	30.320	2.162.367	184.326	4.219.839
Cianjur	2019	1.007.775	32.039	2.336.005	987.653	4.326.090
Cianjur	2020	1.054.579	31.790	2.534.799	593.884	3.706.287
Cianjur	2021	1.066.323	32.897	2.534.799	965.719	3.023.139
Cirebon	2015	813.824	27.596	1.400.000	426.024	2.833.827
Cirebon	2016	847.315	29.149	1.592.220	1.616.489	3.751.312
Cirebon	2017	880.807	30.623	1.723.578	4.899.633	3.924.042
Cirebon	2018	890.762	32.161	1.873.702	4.812.689	4.006.921
Cirebon	2019	961.983	33.668	2.024.160	8.978.364	4.329.478
Cirebon	2020	938.217	33.304	2.196.416	4.955.695	3.632.076
Cirebon	2021	970.262	34.128	2.269.557	4.860.390	3.517.546
Garut	2015	945.768	31.919	1.250.000	237.422	3.307.935
Garut	2016	994.952	33.803	1.421.625	333.631	3.811.194
Garut	2017	1.044.137	35.464	1.538.909	2.074.742	4.512.207
Garut	2018	1.018.544	37.225	1.672.948	286.990	4.475.258
Garut	2019	1.084.901	39.092	1.807.286	776.108	5.048.907
Garut	2020	1.052.573	38.598	1.961.086	726.312	5.966.161
Garut	2021	1.096.134	39.981	1.961.086	1.290.083	5.051.120
Indramayu	2015	677.201	56.663	1.465.000	903.076	3.031.942
Indramayu	2016	711.610	56.706	1.665.810	17.265	3.285.374
Indramayu	2017	746.020	57.515	1.803.239	384.932	3.330.390
Indramayu	2018	776.017	58.287	1.960.301	226.536	3.352.681
Indramayu	2019	830.672	60.153	2.117.714	1.500.245	3.955.508
Indramayu	2020	854.045	59.200	2.297.931	544.359	3.405.819
Indramayu	2021	875.280	59.544	2.373.073	1.908.049	3.494.202
Karawang	2015	873.995	132.453	2.957.450	23.998.570	3.810.189
Karawang	2016	942.411	141.125	3.330.505	23.419.673	4.040.037
Karawang	2017	1.010.828	148.358	3.605.272	28.994.915	4.459.990
Karawang	2018	1.026.586	157.317	3.919.291	14.835.316	4.498.997
Karawang	2019	1.018.087	163.946	4.234.010	24.296.574	4.847.852
Karawang	2020	1.028.735	157.710	4.594.325	16.739.723	4.348.863
Karawang	2021	1.023.790	166.941	4.798.312	26.632.412	4.581.218
Kuningan	2015	435.712	13.175	1.206.000	5.641	2.126.359
Kuningan	2016	430.706	13.977	1.364.760	59.447	2.663.883

Kuningan	2017	425.700	14.866	1.477.353	158.328	2.649.317
Kuningan	2018	432.549	15.821	1.606.030	103.294	2.518.918
Kuningan	2019	460.227	16.864	1.734.994	5.267	3.265.142
Kuningan	2020	463.164	16.882	1.882.642	46.066	2.659.253
Kuningan	2021	479.405	17.483	1.882.642	7.459	2.560.700
Majalengka	2015	580.729	16.590	1.245.000	386.421	2.312.483
Majalengka	2016	574.990	17.591	1.409.360	131.391	2.815.768
Majalengka	2017	569.252	18.789	1.525.632	3.595.069	2.822.788
Majalengka	2018	572.120	20.006	1.653.515	5.547.512	2.817.585
Majalengka	2019	612.010	21.561	1.791.693	1.042.593	3.142.920
Majalengka	2020	625.576	21.754	1.944.166	992.173	3.672.077
Majalengka	2021	614.417	22.788	2.009.000	1.199.302	3.571.270
Pangandaran	2015	192.391	6.271	1.165.000	0	1.145.479
Pangandaran	2016	213.976	6.602	1.324.620	0	1.051.428
Pangandaran	2017	235.561	6.939	1.433.901	0	1.629.494
Pangandaran	2018	231.582	7.308	1.558.794	27.559	1.166.098
Pangandaran	2019	226.853	7.742	1.714.673	100	1.478.535
Pangandaran	2020	233.143	7.738	1.860.591	11.209	1.397.546
Pangandaran	2021	233.703	8.022	1.860.591	18.942	1.479.590
Purwakarta	2015	371.543	37.899	2.600.000	5.336.199	2.026.923
Purwakarta	2016	382.145	40.169	2.927.990	3.966.332	1.896.434
Purwakarta	2017	392.747	42.239	3.169.549	4.072.625	2.168.343
Purwakarta	2018	395.512	44.341	3.445.617	6.172.779	2.075.995
Purwakarta	2019	405.052	46.278	3.722.300	6.226.744	2.325.063
Purwakarta	2020	384.543	45.293	4.039.068	6.981.956	2.389.179
Purwakarta	2021	391.444	46.840	4.173.569	4.730.175	2.399.025
Subang	2015	633.116	23.696	1.900.000	2.532.669	2.357.474
Subang	2016	678.712	24.976	2.149.720	907.810	2.873.029
Subang	2017	724.308	26.250	2.327.072	1.191.705	1.882.291
Subang	2018	711.978	27.408	2.529.759	1.544.283	2.967.929
Subang	2019	755.892	28.672	2.732.900	2.462.340	3.095.501
Subang	2020	746.284	28.342	2.965.468	4.250.476	3.363.029
Subang	2021	763.589	29.023	3.064.218	5.426.162	3.075.960
Sukabumi	2015	912.272	6.985	1.940.000	4.939.175	3.002.431
Sukabumi	2016	974.902	7.379	2.195.435	1.066.008	3.680.241
Sukabumi	2017	1.037.532	7.780	2.376.558	497.723	4.026.245
Sukabumi	2018	1.027.606	8.209	2.583.557	965.996	4.092.789
Sukabumi	2019	1.061.319	8.664	2.791.016	585.190	4.115.065
Sukabumi	2020	1.036.735	8.534	3.028.532	1.701.780	4.179.096

Sukabumi	2021	1.105.875	8.851	3.125.445	2.021.734	4.023.994
Sumedang	2015	481.029	18.950	2.001.195	1.104.615	2.240.675
Sumedang	2016	493.428	20.029	2.275.715	581.362	2.549.405
Sumedang	2017	505.827	21.276	2.463.461	4.240.950	2.681.465
Sumedang	2018	507.378	22.507	2.678.029	1.106.170	2.818.840
Sumedang	2019	539.658	23.932	2.893.075	1.229.442	3.206.716
Sumedang	2020	574.606	23.665	3.139.275	1.180.357	2.821.541
Sumedang	2021	581.097	24.414	3.241.930	4.249.320	2.176.829
Tasikmalaya	2015	724.664	19.662	1.435.000	6.947	2.356.883
Tasikmalaya	2016	743.398	20.824	1.632.360	5.013	3.532.220
Tasikmalaya	2017	762.133	22.063	1.776.686	48.639	3.514.045
Tasikmalaya	2018	774.131	23.320	1.920.938	73.866	3.644.401
Tasikmalaya	2019	836.402	24.586	2.075.189	0	4.054.018
Tasikmalaya	2020	877.416	24.344	2.251.788	141.219	3.648.899
Tasikmalaya	2021	878.438	25.179	2.251.788	8.599	3.300.111
Kota Bandung	2015	1.084.989	149.580	2.310.000	11.986.714	6.515.773
Kota Bandung	2016	1.100.759	161.227	2.626.940	7.169.244	6.679.354
Kota Bandung	2017	1.116.529	172.851	2.843.663	2.077.222	6.267.135
Kota Bandung	2018	1.107.986	185.084	3.091.346	2.397.653	6.541.791
Kota Bandung	2019	1.217.862	197.642	3.339.581	6.310.285	6.616.198
Kota Bandung	2020	1.167.849	193.144	3.623.779	10.625.602	7.698.341
Kota Bandung	2021	1.185.623	200.414	3.742.276	11.446.494	6.607.463
Kota Banjar	2015	77.929	2.624	1.168.000	0	688.144
Kota Banjar	2016	80.980	2.772	1.327.965	0	941.240
Kota Banjar	2017	84.032	2.919	1.437.522	0	875.127
Kota Banjar	2018	85.113	3.067	1.562.730	0	887.431
Kota Banjar	2019	91.471	3.221	1.688.218	0	1.017.745
Kota Banjar	2020	91.602	3.251	1.831.885	5.391	836.711
Kota Banjar	2021	88.631	3.364	1.831.885	1.086	792.680
Kota Bekasi	2015	1.081.936	55.456	2.954.031	842.859	4.213.186
Kota Bekasi	2016	1.174.314	58.831	3.327.160	3.262.471	5.076.566
Kota Bekasi	2017	1.266.692	62.202	3.601.650	3.833.261	4.508.849
Kota Bekasi	2018	1.325.953	65.845	3.915.354	6.372.571	5.142.512
Kota Bekasi	2019	1.372.345	69.406	4.229.757	7.240.583	5.755.333
Kota Bekasi	2020	1.348.530	67.619	4.589.709	6.661.399	6.179.273
Kota Bekasi	2021	1.376.447	69.796	4.782.936	8.167.096	6.192.829
Kota Bogor	2015	400.983	25.298	2.658.155	280.115	2.039.483
Kota Bogor	2016	424.684	27.002	3.022.765	715.608	2.492.967
Kota Bogor	2017	448.386	28.654	3.272.143	5.187.390	2.594.718

Kota Bogor	2018	471.775	30.413	3.557.147	3.103.415	2.717.401
Kota Bogor	2019	482.921	32.295	3.842.786	2.383.580	2.961.659
Kota Bogor	2020	449.120	32.162	4.169.807	1.603.215	2.624.150
Kota Bogor	2021	466.645	33.372	4.169.807	618.472	2.552.223
Kota Cimahi	2015	257.105	17.876	2.001.200	252.951	1.258.220
Kota Cimahi	2016	264.561	18.882	2.275.715	1.087.268	1.565.824
Kota Cimahi	2017	272.017	19.907	2.463.461	365.587	1.430.776
Kota Cimahi	2018	273.955	21.192	2.678.028	174.235	1.656.270
Kota Cimahi	2019	269.978	22.856	2.893.074	1.326.167	1.648.100
Kota Cimahi	2020	254.699	22.340	3.139.275	1.091.053	1.568.476
Kota Cimahi	2021	254.059	23.275	3.241.929	405.582	1.527.023
Kota Cirebon	2015	126.821	13.269	1.415.000	154.208	1.267.648
Kota Cirebon	2016	134.533	14.077	1.608.945	192.706	1.565.393
Kota Cirebon	2017	142.246	14.893	1.741.683	290.295	1.504.383
Kota Cirebon	2018	148.033	15.817	1.893.384	561.948	1.503.054
Kota Cirebon	2019	138.598	16.812	2.045.422	10.374	1.810.629
Kota Cirebon	2020	139.334	16.648	2.219.488	40.795	1.850.546
Kota Cirebon	2021	139.397	17.154	2.271.202	80.129	1.459.202
Kota Depok	2015	896.981	37.529	2.705.000	567.760	2.549.471
Kota Depok	2016	953.191	40.263	3.046.180	713.022	3.537.819
Kota Depok	2017	1.009.401	42.981	3.297.489	1.078.358	3.491.263
Kota Depok	2018	1.028.292	45.978	3.584.700	1.727.293	3.659.366
Kota Depok	2019	1.104.720	49.076	3.872.552	6.164.958	4.001.923
Kota Depok	2020	1.077.600	48.135	4.202.106	7.887.879	3.698.783
Kota Depok	2021	1.089.295	49.946	4.339.515	3.515.916	3.568.696
Kota Sukabumi	2015	133.746	6.985	1.572.000	75.607	1.033.403
Kota Sukabumi	2016	132.327	7.379	1.834.175	10.917	1.282.942
Kota Sukabumi	2017	130.909	7.780	1.985.494	1.691	1.297.066
Kota Sukabumi	2018	132.848	8.209	2.158.431	929	1.360.586
Kota Sukabumi	2019	141.762	8.664	2.331.753	46.990	1.403.097
Kota Sukabumi	2020	122.662	8.534	2.530.183	81.569	1.344.538
Kota Sukabumi	2021	128.395	8.851	2.530.183	197.503	1.242.179
Kota Tasikmalaya	2015	301.406	12.370	1.450.000	10.056	1.373.111
Kota Tasikmalaya	2016	295.901	13.225	1.641.280	43.184	1.905.192
Kota Tasikmalaya	2017	290.396	14.027	1.776.686	124.116	1.970.213
Kota Tasikmalaya	2018	287.233	14.859	1.931.435	43.585	1.945.643
Kota Tasikmalaya	2019	310.555	15.746	2.086.530	2.219	2.009.798
Kota Tasikmalaya	2020	315.844	15.430	2.264.093	19.107	1.713.330
Kota Tasikmalaya	2021	316.349	15.981	2.264.093	1.357	1.717.734

## Lampiran 2 : Model Regresi Data Panel

### *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: ORANG\_BEKERJA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/19/22 Time: 19:35  
 Sample: 2015 2021  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-196213.9	48649.34	-4.033229	0.0001
PDRB	-1.512700	0.631556	-2.395197	0.0176
UMK	0.007339	0.019562	0.375146	0.7080
INVESTASI	0.004680	0.002983	1.569054	0.1184
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.296703	0.013786	21.52171	0.0000
R-squared	0.866837	Mean dependent var		771675.3
Adjusted R-squared	0.863942	S.D. dependent var		509642.7
S.E. of regression	187986.8	Akaike info criterion		27.15223
Sum squared resid	6.50E+12	Schwarz criterion		27.23799
Log likelihood	-2560.886	Hannan-Quinn criter.		27.18697
F-statistic	299.4417	Durbin-Watson stat		0.519111
Prob(F-statistic)	0.000000			

### *Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: ORANG\_BEKERJA  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/19/22 Time: 19:36  
 Sample: 2015 2021  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	378326.5	25884.11	14.61617	0.0000
PDRB	3.112725	0.703096	4.427169	0.0000
UMK	0.056509	0.011270	5.014039	0.0000
INVESTASI	0.000360	0.001362	0.264300	0.7919
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.027364	0.008213	3.331616	0.0011

Effects Specification



---

Cross-section fixed (dummy variables)

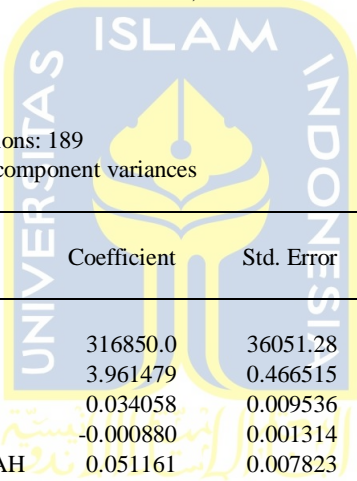
---

R-squared	0.994871	Mean dependent var	771675.3
Adjusted R-squared	0.993897	S.D. dependent var	509642.7
S.E. of regression	39814.73	Akaike info criterion	24.17075
Sum squared resid	2.50E+11	Schwarz criterion	24.70247
Log likelihood	-2253.136	Hannan-Quinn criter.	24.38616
F-statistic	1021.521	Durbin-Watson stat	1.123664
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

### **Random Effect Model (REM)**

Dependent Variable: ORANG\_BEKERJA  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 12/19/22 Time: 19:37  
 Sample: 2015 2021  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 27  
 Total panel (balanced) observations: 189  
 Swamy and Arora estimator of component variances



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	316850.0	36051.28	8.788869	0.0000
PDRB	3.961479	0.466515	8.491650	0.0000
UMK	0.034058	0.009536	3.571397	0.0005
INVESTASI	-0.000880	0.001314	-0.669942	0.5037
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.051161	0.007823	6.539656	0.0000

---

#### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	149057.2	0.9334
Idiosyncratic random	39814.73	0.0666

---

#### Weighted Statistics

R-squared	0.614334	Mean dependent var	77512.94
Adjusted R-squared	0.605950	S.D. dependent var	79768.04
S.E. of regression	50073.09	Sum squared resid	4.61E+11
F-statistic	73.27430	Durbin-Watson stat	0.668703
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

#### Unweighted Statistics

---

R-squared	0.602935	Mean dependent var	771675.3
Sum squared resid	1.94E+13	Durbin-Watson stat	0.015911

---



## Lampiran 3 : Estimasi Data

### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: MODEL\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	151.688445	(26,158)	0.0000
Cross-section Chi-square	615.499370	26	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ORANG\_BEKERJA  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/19/22 Time: 19:41  
Sample: 2015 2021  
Periods included: 7  
Cross-sections included: 27  
Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-196213.9	48649.34	-4.033229	0.0001
PDRB	-1.512700	0.631556	-2.395197	0.0176
UMK	0.007339	0.019562	0.375146	0.7080
INVESTASI	0.004680	0.002983	1.569054	0.1184
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.296703	0.013786	21.52171	0.0000

R-squared	0.866837	Mean dependent var	771675.3
Adjusted R-squared	0.863942	S.D. dependent var	509642.7
S.E. of regression	187986.8	Akaike info criterion	27.15223
Sum squared resid	6.50E+12	Schwarz criterion	27.23799
Log likelihood	-2560.886	Hannan-Quinn criter.	27.18697
F-statistic	299.4417	Durbin-Watson stat	0.519111
Prob(F-statistic)	0.000000		

### Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MODEL\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.



Cross-section random 111.030909 4 0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	3.112725	3.961479	0.276708	0.1066
UMK	0.056509	0.034058	0.000036	0.0002
INVESTASI	0.000360	-0.000880	0.000000	0.0005
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.027364	0.051161	0.000006	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ORANG\_BEKERJA

Method: Panel Least Squares

Date: 12/19/22 Time: 19:42

Sample: 2015 2021

Periods included: 7

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	378326.5	25884.11	14.61617	0.0000
PDRB	3.112725	0.703096	4.427169	0.0000
UMK	0.056509	0.011270	5.014039	0.0000
INVESTASI	0.000360	0.001362	0.264300	0.7919
PENGLUARAN_PEMERINTAH	0.027364	0.008213	3.331616	0.0011

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994871	Mean dependent var	771675.3
Adjusted R-squared	0.993897	S.D. dependent var	509642.7
S.E. of regression	39814.73	Akaike info criterion	24.17075
Sum squared resid	2.50E+11	Schwarz criterion	24.70247
Log likelihood	-2253.136	Hannan-Quinn criter.	24.38616
F-statistic	1021.521	Durbin-Watson stat	1.123664
Prob(F-statistic)	0.000000		